

Katalog: 9302020.6401

**PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN PASER**

Menurut Pengeluaran

**2013-2017**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PASER**

**PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN PASER**

Menurut Pengeluaran

**2013-2017**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN PASER  
MENURUT PENGELUARAN  
TAHUN 2013 – 2017**

ISBN: 978-602-52626-1-6

Nomor Publikasi: 64015.18.02

Katagolog BPS: 9302020.6401

Ukuran Buku: 21,0 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 70 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

**Penanggungjawab Umum:**

Ir. Bahramsyah

**Penyunting:**

Maulana Malik Herdianto, S.Si.

**Penulis:**

Uci Yumanda Rizki, SST

**Pengolah Data:**

Uci Yumanda Rizki, SST

**Tata Letak dan Gambar Kulit:**

Muhammad Ricky Pranata, SST

Uci Yumanda Rizki, SST

<https://pase.kubhps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir Kabupaten Paser. Pendekatan ini dirinci menurut beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto (Ekspor dikurangi dengan Impor).

Data yang digunakan dalam penghitungan komponen PDRB menurut Pengeluaran diperoleh dari dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun pihak swasta, juga data yang bersumber dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan publikasi ini dapat membantu pihak perencana daerah, para analis, lembaga/instansi pemerintah lainnya serta pihak swasta.

Disadari dalam penerbitan publikasi ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat penyempurnaan pada penerbitan yang akan datang. Dengan demikian saran dan kritik dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Tana Paser, Agustus 2018

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Paser,



**Ir. BAHRAMSYAH**



# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
BAB I      Pendahuluan .....	1
1.1    Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
1.2    Kegunaan Statistik PDRB .....	4
1.3    Perubahan Tahun Dasar .....	5
BAB II     Metode Estimasi dan Sumber Data .....	9
2.1    Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	11
2.2    Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga .....	14
2.3    Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	17
2.4    Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	19
2.5    Perubahan Inventori .....	23
2.6    Ekspor dan Impor .....	27
BAB III    Tinjauan Perekonomian Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	29
3.1    Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran .....	31
3.2    Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	37
3.3    Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	41
3.4    Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah .....	42
3.5    Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	43
3.6    Perkembangan Perubahan Inventori .....	44
3.7    Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah .....	45
BAB IV     Perkembangan Agregat PDRB Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	47
4.1    PDRB (Nominal) .....	49
4.2    Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB .....	50
4.3    Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB .....	51

BAB V	Penutup .....	53
	Daftar Pustaka .....	57
	Lampiran .....	61

<https://paserkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 .....	32
Tabel 2. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 .....	33
Tabel 3. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 .....	34
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 .....	36
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 .....	37
Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	38
Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2013 – 2017.....	39
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	40
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	41
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	41
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	42
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	44
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	44
Tabel 14. Perkembangan Ekspor Neto Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	46
Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Paser, 2013 – 2017 .....	49
Tabel 16. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Paser, 2013—2017 .....	50
Tabel 17. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB, 2013 – 2017 .....	51



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Pengeluaran .....	6
Gambar 2. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 .....	32
Gambar 3. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Triliun Rp) .....	33
Gambar 4. Perbandingan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Triliun Rp) ...	34
Gambar 5. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2017 (Persen) .....	35
Gambar 6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen) .....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 - 2017 (Juta Rupiah) .....	63
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 - 2017 (Juta Rupiah) .....	64
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen) .....	65
Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen) .....	66
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen) .....	67
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen) ....	68
Lampiran 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 .....	69
Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen) .....	70



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

<https://paserkab.bps.go.id>



## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Pengalihan; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi subkategori-subkategori lapangan usaha.

**b. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

**c. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; (4) pembentukan modal tetap domestik bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## **1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB**

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar wilayah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

### **1.3 PERUBAHAN TAHUN DASAR**

Perubahan tahun dasar (*Rebasing*) adalah proses penetapan kembali tahun dasar baru yang digunakan dalam pengukuran PDB. Perubahan tahun dasar perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem perdagangan internasional, dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

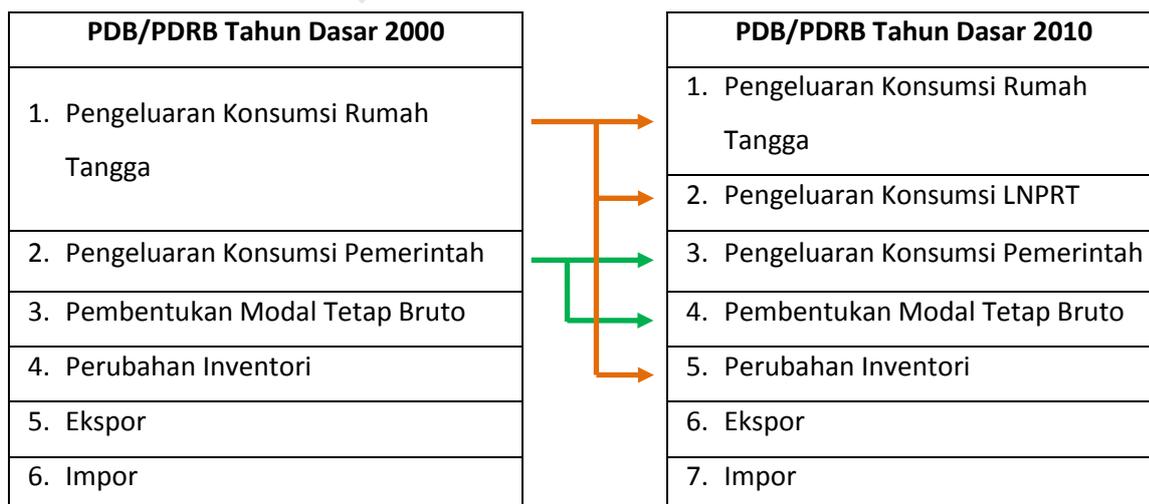
Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB dari tahun 2000 menjadi 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* (SNA) 2008. Perubahan tahun dasar dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Sebagaimana disebutkan bahwa perubahan tahun dasar mengacu pada SNA 2008. SNA 2008 atau Sistem Neraca Nasional 2008 adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas ekonomi dalam hal produksi, konsumsi, dan akumulasi harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami. Dalam sejarahnya, SNA 2008 merupakan versi yang kelima, dimana versi sebelumnya adalah SNA 1947, SNA 1953, SNA 1968, dan SNA 1993.

Dalam SNA 2008 terdapat 118 revisi dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Perubahan SNA 2008 mencakup perubahan konsep dan cakupan, metodologi, valuasi, dan penggunaan klasifikasi. Klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak perubahan. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Pengeluaran**



Perubahan tahun dasar PDB/PDRB memiliki manfaat antara lain:

1. Menginformasikan perekonomian nasional/regional terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas PDB/PDRB;
3. Menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara internasional.

Selanjutnya perubahan harga tahun dasar juga akan memberikan beberapa dampak, antara lain:

1. Meningkatnya nominal PDB/PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan dan pergeseran struktur ekonomi;
2. Akan mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
3. Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Sementara itu pemilihan tahun 2010 sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

1. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index/PPI*);
6. Tersedianya kerangka kerja *Supply and Use Table* (SUT) yang digunakan untuk *benchmarking*/ menetapkan PDB.

Penjelasan lebih rinci terkait dengan perubahan tahun dasar 2010 bisa dilihat pada publikasi PDRB Kabupaten Paser menurut Lapangan Usaha.



**BAB II**  
**METODE ESTIMASI DAN**  
**SUMBER DATA**

<https://paserkab.bps.go.id>



## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya;
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel;

12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran;
7. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);  
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
2. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
3. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
4. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (tidak diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran

konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

#### **iv. Penghitungan PK-RT Tahunan**

##### **1. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- 1) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan;
- 2) Jumlah penduduk pertengahan tahun;
- 3) Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu;
- 4) Indeks Harga Konsumen (IHK).

##### **2. Metode Penghitungan**

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besaran PK-RT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-RT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PK-RT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Estimasi PK-RT hasil Susenas:

- a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
  - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
- 2) Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
  - 3) Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
  - 4) Diperoleh nilai PK-RT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
  - 5) Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
  - 6) PK-RT ADH Konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA

### i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii. Konsep dan Definisi

LNPR merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPR) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

3. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
5. Istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### **iii. Cakupan**

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan, pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lainnya, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll;
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya;
- c. Penyusutan;
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### **iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan**

#### **1. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-LNPRT bersumber dari:

- 1) Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SK-LNP)  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- 2) Hasil *up-dating* direktori LNPRT  
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- 3) Indeks Harga Konsumen (IHK)

## 2. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

$j$  : Jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- 2) Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT ADH Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan.

Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

### iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) kabupaten/kota mencakup:

- a. PK-Pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota bersangkutan;
- b. PK-Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. PK-Pemerintah provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota;
- d. PK-Pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota;

### iv. Penghitungan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahunan

#### 1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P tahunan adalah:

- 1) Data realisasi APBN Tahunan (Kementerian Keuangan)
- 2) Data realisasi APBD Tahunan (BPKAD)
- 3) Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- 4) Output Bank Indonesia (BI)
- 5) Gaji Pegawai Negeri Sipil (Kementerian Keuangan dan BPKAD)
- 6) Indeks Harga dan Indeks Upah (BPS)

#### 2. Metode Penghitungan

##### a. PK-P Kabupaten/Kota ADH Berlaku

Secara umum, PK-P ADH Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADH Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PK-P kabupaten/kota ADH Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **b. PK-P Kabupaten/Kota ADH Konstan**

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## **2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)**

### **i. Pendahuluan**

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi meliputi investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

### **ii. Konsep dan Definisi**

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan

besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa didalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

### iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

### iv. Penghitungan PMTB Tahunan

#### 1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri dari BPS provinsi/kabupaten/kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.

- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi).
- d. Laporan Keuangan Perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

## 2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

### Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH Berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH Konstan, maka PMTB ADH Berlaku

tersebut di-"deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. PMTB dalam bentuk bangunan, dihitung dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan men-"deflate" PMTB (ADH Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di-"reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia, dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara men-"deflate" PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BPH Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaikinya diperlukan survei dalam skala yang besar;
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh;
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan Inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

## ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku maupun bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

## iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### **iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari hasil kegiatan survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- c. Data komoditas pertambangan dari Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih; dan
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

## 2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung posisi inventori ADH Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. Menghitung perubahan inventori ADH Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. Menghitung perubahan inventori ADH Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADH Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

### Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH Konstan dihitung dengan: a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah sebagai berikut:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

## 2.6 EKSPOR DAN IMPOR

### i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### ii. Konsep dan definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut.

### iii. Cakupan

Ekspor dan impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor barang dan jasa ke luar negeri/propinsi/kabupaten/kota tersebut;
- b. Impor barang dan jasa dari luar negeri/propinsi/kabupaten/kota tersebut;

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

### iv. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

#### 1. Sumber Data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi/kabupaten/kota di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi/kabupaten/kota dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

#### 2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

**BAB III**  
**TINJAUAN PEREKONOMIAN**  
**KABUPATEN PASER, 2013 - 2017**

<https://paserkab.bps.go.id>



### 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Perekonomian Kabupaten Paser mengalami peningkatan pada tahun 2017 setelah dua tahun sebelumnya mengalami penurunan. PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku mencapai 43,88 triliun rupiah pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 37,29 triliun rupiah dan tahun 2015 sebesar 38,31 triliun rupiah. Peningkatan 6,59 triliun rupiah pada tahun 2017 tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan nilai dari beberapa komponen utama PDRB pengeluaran yang disebabkan oleh perubahan harga dan juga perubahan volume. Jika dilihat lebih rinci terhadap komponen pembentuk PDRB pengeluaran, empat dari enam komponen pembentuknya mengalami peningkatan. Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Net Ekspor mengalami peningkatan. Sedangkan dua komponen lainnya, yaitu Konsumsi Pemerintah dan Perubahan Inventori mengalami penurunan dibanding tahun 2016.

Komponen yang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu Komponen Net Ekspor. Komponen ini mengalami peningkatan sebesar 5,75 triliun rupiah, yaitu dari 22,97 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 28,72 triliun rupiah pada tahun 2017. Selanjutnya Komponen Pembentukan Modal Tetap bruto yang mengalami peningkatan 0,74 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, dari 7,34 triliun rupiah menjadi 8,08 triliun rupiah. Konsumsi Rumah Tangga mengalami peningkatan sebesar 0,17 triliun rupiah, dari 5,31 triliun rupiah menjadi 5,49 triliun rupiah. Dan untuk Komponen Konsumsi LNPRT juga mengalami peningkatan sebesar 4,3 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, dari 60,53 miliar rupiah menjadi 64,83 miliar rupiah.

Sementara Komponen Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan 51,57 miliar rupiah, yaitu dari 1.363,78 miliar rupiah pada tahun 2016 turun menjadi 1.312 miliar rupiah pada tahun 2017. Komponen Perubahan Inventori juga mengalami penurunan sebesar 15,31 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, dari 228,92 miliar rupiah menjadi 213,61 miliar rupiah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku menurut komponen pengeluaran periode 2013 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.

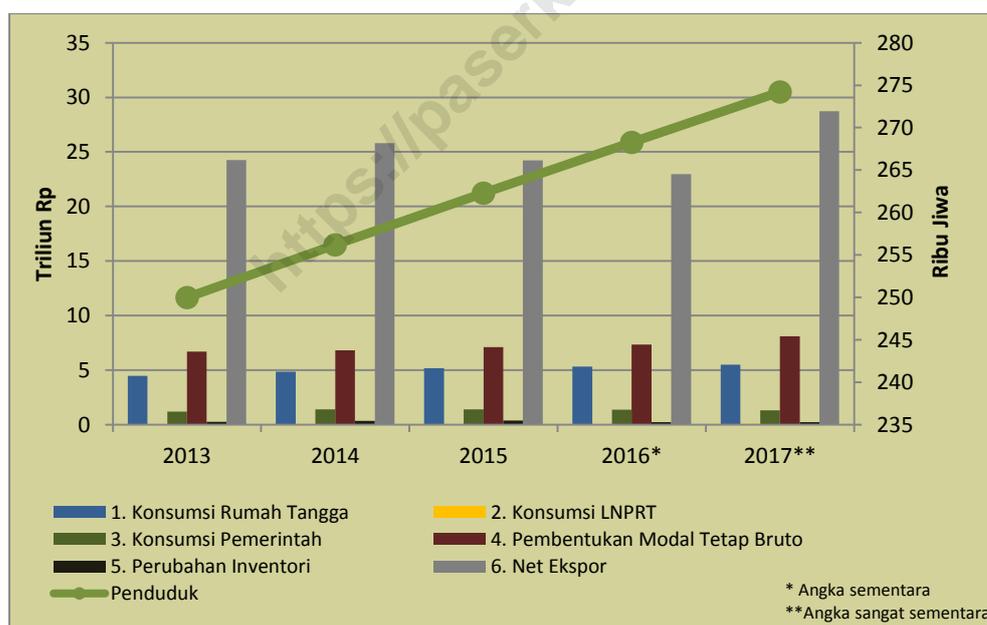
**Tabel 1. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 - 2017**

(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.472,39	4.854,93	5.163,39	5.314,35	5.488,38
2. Konsumsi LNPR	42,85	52,80	60,92	60,53	64,83
3. Konsumsi Pemerintah	1.201,84	1.387,99	1.401,21	1.363,78	1.312,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.690,78	6.811,55	7.107,95	7.344,86	8.081,04
5. Perubahan Inventori	247,01	349,64	363,65	228,92	213,61
6. Net Ekspor	24.261,41	25.793,99	24.212,16	22.973,51	28.719,67
<b>PDRB</b>	<b>36.916,27</b>	<b>39.250,90</b>	<b>38.309,28</b>	<b>37.285,96</b>	<b>43.879,54</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Gambar 2. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017**



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi

secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga Konstan 2010 periode 2013 – 2017 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Gambar 3 berikut ini:

**Tabel 2. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017**

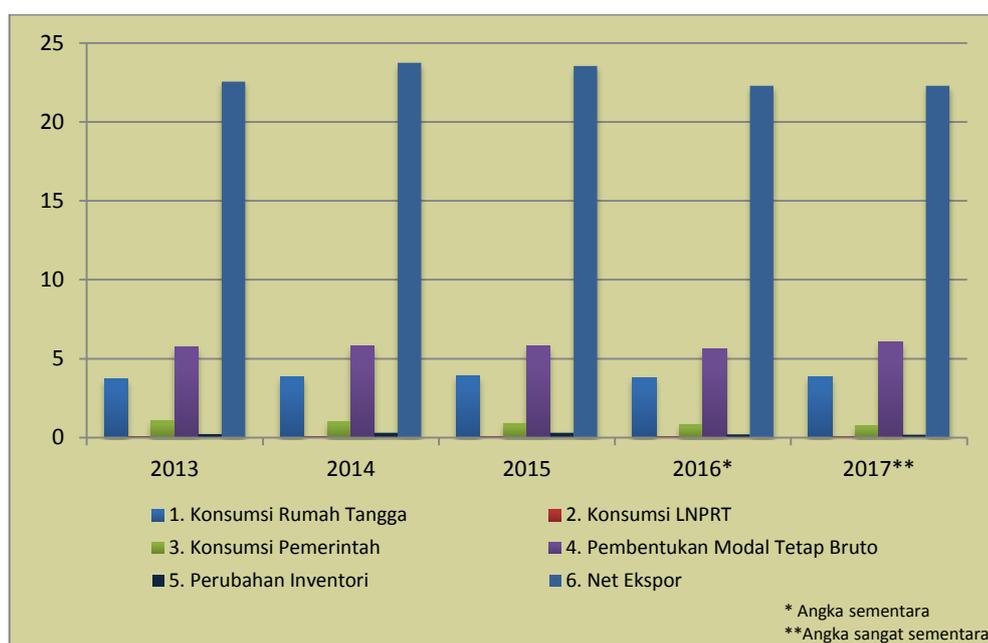
Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.695,48	3.859,29	3.894,77	3.806,89	3.818,38
2. Konsumsi LNPRT	36,77	42,66	46,57	43,72	45,43
3. Konsumsi Pemerintah	1.040,06	1.030,96	894,34	810,33	758,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.745,15	5.806,64	5.790,43	5.620,19	6.047,99
5. Perubahan Inventori	222,70	306,35	308,52	195,16	171,73
6. Net Ekspor	22.541,06	23.736,64	23.538,24	22.285,04	22.288,93
<b>PDRB</b>	<b>33.281,22</b>	<b>34.782,54</b>	<b>34.472,88</b>	<b>32.761,34</b>	<b>33.131,44</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Paser pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 33.131,44 miliar rupiah dari sebelumnya tahun 2016 sebesar 32.761,34 miliar rupiah. Dari Gambar 3, dapat dilihat bahwa Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tertinggi padan tahun 2017.

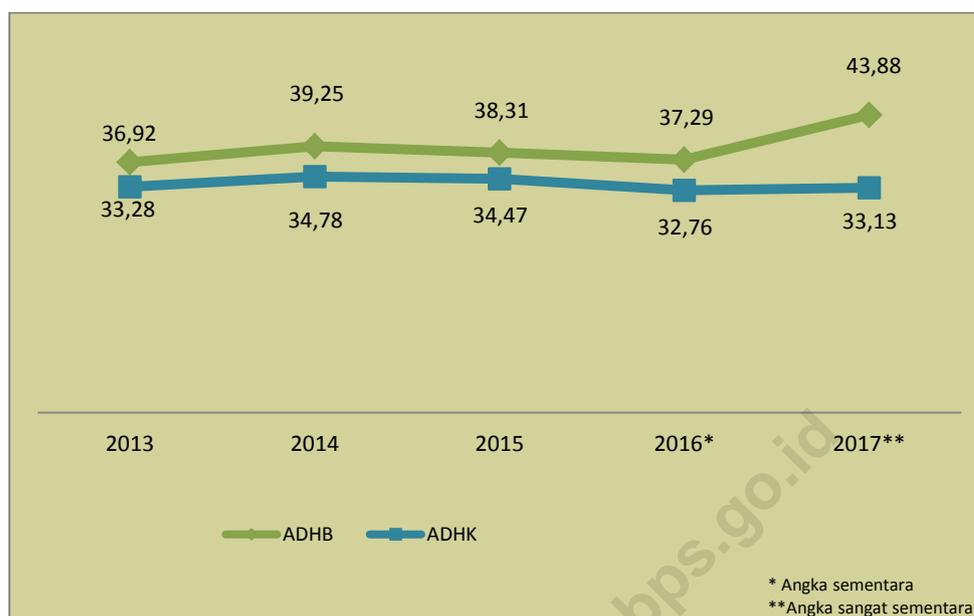
**Gambar 3. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Triliun Rp)**



\* Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

**Gambar 4. Perbandingan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Triliun Rp)**



Dari Gambar 4, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	12,11	12,37	13,48	14,25	12,51
2. Konsumsi LNPRT	0,12	0,13	0,16	0,16	0,15
3. Konsumsi Pemerintah	3,26	3,54	3,66	3,66	2,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,12	17,35	18,55	19,70	18,42
5. Perubahan Inventori	0,67	0,89	0,95	0,61	0,49
6. Net Ekspor	65,72	65,72	63,20	61,61	65,45
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

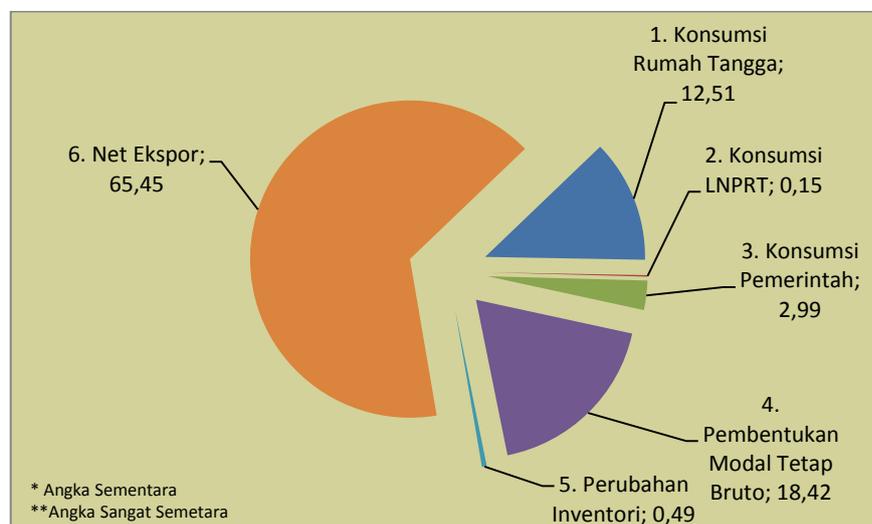
(PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013 – 2017, PDRB Kabupaten Paser dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan distribusinya, yaitu :

1. Komponen yang memiliki kontribusi terbesar yaitu Net Ekspor. Komponen ini sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser. Pada tahun 2013 – 2017 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor impor, menunjukkan ekspor yang lebih tinggi dari impor, sehingga menunjukkan kondisi surplus selama periode tersebut.
2. Komponen yang memiliki kontribusi sedang yaitu Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) memiliki kontribusi sebesar 12,11 sampai 14,45 persen selama periode 2013 – 2017. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 17,35 sampai 19,70 persen selama periode tersebut.
3. Komponen yang memiliki kontribusi kecil yaitu Konsumsi Akhir Pemerintah, Konsumsi Akhir LNPRT dan Perubahan Inventori, yang hanya berkisar antara 0 sampai 4 persen. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dari pemerintah, LNPRT, dan perubahan inventori tidak signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser.

Untuk lebih jelasnya distribusi PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran pada tahun 2017, dapat dilihat pada Gambar 5.

**Gambar 5. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2017 (Persen)**



Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dari Tabel 4, dapat dilihat kondisi perekonomian Kabupaten Paser menunjukkan tanda semakin membaik pada tahun 2017, ini terlihat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan nilai positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selama periode 2013 – 2017 adalah 6,81 persen pada tahun 2013; 4,51 persen pada tahun 2014; -0,89 persen pada tahun 2015; -4,96 persen pada tahun 2016; dan 1,13 persen pada tahun 2017. Sedangkan dari Gambar 6 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode yang sama.

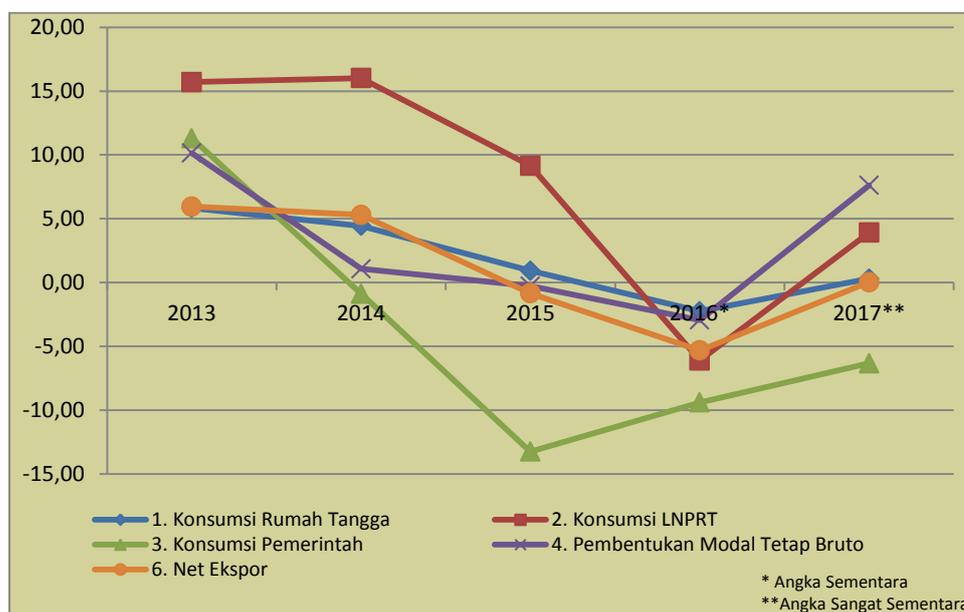
**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,84	4,43	0,92	-2,26	0,30
2. Konsumsi LNPRT	15,71	16,02	9,16	-6,10	3,91
3. Konsumsi Pemerintah	11,31	-0,88	-13,25	-9,39	-6,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,14	1,07	-0,28	-2,94	7,61
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	5,95	5,30	-0,84	-5,32	0,02
<b>PDRB</b>	<b>6,81</b>	<b>4,51</b>	<b>-0,89</b>	<b>-4,96</b>	<b>1,13</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Gambar 6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen)**



Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga cenderung menunjukkan peningkatan. Indeks implisit digunakan untuk melihat inflasi dari sisi perekonomian secara makro.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	121,02	125,80	132,57	139,60	143,74
2. Konsumsi LNPRT	116,53	123,76	130,83	138,44	142,68
3. Konsumsi Pemerintah	115,55	134,63	156,68	168,30	172,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	116,46	117,31	122,75	130,69	133,62
5. Perubahan Inventori	110,92	114,13	117,87	117,29	124,39
6. Net Ekspor	107,63	108,67	102,86	103,09	128,85
<b>PDRB</b>	<b>110,92</b>	<b>112,85</b>	<b>111,13</b>	<b>113,81</b>	<b>132,44</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode 2013 – 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Tujuan penghitungan indeks implisit adalah untuk melihat pertumbuhan harga dibandingkan tahun dasar. Indeks implisit pada tahun 2013 sebesar 110,92; kemudian cenderung meningkat berturut-turut sebesar 112,85 pada tahun 2014; 111,13 pada tahun 2015; 113,81 pada tahun 2016; dan 132,44 pada tahun 2017.

### 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati posisi ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Paser,  
2013 – 2017**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.472,39	4.854,93	5.163,39	5.314,35	5.488,38
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.695,48	3.859,29	3.894,77	3.806,89	3.818,38
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	12,11	12,37	13,48	14,25	12,51
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Ribuan Rp)					
a. ADHB (Ribuan Rp)	17.890,20	18.951,61	19.684,96	19.810,39	20.015,55
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp)	14.782,46	15.065,03	14.848,46	14.190,98	13.925,22
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	5,84	4,43	0,92	-2,26	0,30
b. Perkapita	3,36	1,91	-1,44	-4,43	-1,87
Jumlah penduduk	249.991	256.175	262.301	268.261	274.206

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan secara nominal (ADH Berlaku), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB dalam periode 2013 – 2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2013 mencapai 12,11 persen dan terus meningkat menjadi 14,25 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB mengalami penurunan menjadi 12,51 persen.

Meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya daya beli. Hal ini akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) mendorong kenaikan belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumah tangga di Kabupaten Paser menghabiskan dana sekitar 17,89 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi berupa makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga mencapai 20,02 juta rupiah pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata

konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Paser meningkat secara nominal. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADH Konstan sebesar 5,84 persen pada tahun 2013. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung melambat dan pada tahun 2017 menjadi 0,30 persen. Seiring melambatnya pertumbuhan total konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi per kapita juga mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2013 pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita mencapai 3,36 persen, dan pada tahun 2017 pertumbuhannya negatif 1,87 persen. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di atas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, sehingga pada saat pertumbuhan total konsumsi rumah tangga sudah positif pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi perkapitanya masih negatif.

**Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2013—2017**

		(Persen)				
Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	42,92	42,18	43,48	46,62	47,16	
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,27	2,22	2,31	2,28	2,23	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,24	16,46	16,42	15,98	15,78	
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,14	5,26	5,03	4,78	4,56	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,37	18,66	17,81	16,63	16,39	
f. Hotel dan Restoran	11,22	11,46	11,57	10,50	10,80	
g. Lainnya	3,83	3,75	3,38	3,20	3,08	
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Selama periode 2013 – 2017, dalam struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Paser, terlihat bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan masih berada pada kisaran di bawah 48 persen. Proporsi konsumsi makanan pada masing-masing tahun sebesar 42,92 persen (2013); 42,18 persen (2014); 43,48 persen (2015); 46,62 persen (2016); dan 47,16 persen (2017).

Struktur konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non-makanan yang masih cukup kuat. Namun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat

dari perubahan dan pengaruh tatanan sosial ekonomi dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil”-nya, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga tahun 2017 yang mengalami peningkatan yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Rokok; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki; serta Kelompok Hotel dan Restoran dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,34 persen; 0,34 persen; serta 4,02 persen. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2013 – 2017**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,36	4,12	0,74	1,55	3,34
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,33	3,09	6,67	1,27	0,34
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,81	4,06	1,48	-1,32	-3,22
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,12	4,89	0,01	-3,08	-4,89
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,26	4,73	0,06	-6,47	-3,38
f. Hotel dan Restoran	7,95	4,95	1,85	-9,48	4,02
g. Lainnya	11,39	6,66	-0,49	-5,75	-3,98

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Kenaikan harga kelompok makanan paling tinggi terjadi pada tahun 2015, namun pada tahun-tahun yang lain kenaikannya berfluktuatif. Peningkatan harga kelompok makanan berturut-turut adalah 8,69 persen (2013); 2,45 persen (2014); 8,82 persen (2015); 8,67 persen (2016); dan 1,09 persen (2017).

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2013 – 2017**

(Persen)					
Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,69	2,45	8,82	8,67	1,09
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,44	2,93	3,51	0,33	0,93
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,17	5,69	4,55	1,51	5,35
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,70	5,96	1,58	1,03	3,48
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,42	5,32	1,42	2,78	5,31
f. Hotel dan Restoran	7,55	5,73	5,41	3,19	2,12
g. Lainnya	-1,51	-0,56	-3,50	3,36	3,51
<b>Total Konsumsi</b>	<b>6,57</b>	<b>3,95</b>	<b>5,38</b>	<b>5,30</b>	<b>2,96</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Paser, 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	42,85	52,80	60,92	60,53	64,83
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	36,77	42,66	46,57	43,72	45,43
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,12	0,13	0,16	0,16	0,15
Pertumbuhan (ADHK 2010)	15,71	16,02	9,16	-6,10	3,91

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Paser serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah berfluktuatif secara nominal dan secara riil menunjukkan penurunan. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADH Berlaku sebesar 1.201,84 miliar rupiah, kemudian terus meningkat hingga tahun 2015 mencapai 1.401,21 miliar rupiah, namun sejak tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1.363,78 miliar rupiah, dan tahun 2017 turun kembali menjadi 1.312 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser, 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.201,84	1.387,99	1.401,21	1.363,78	1.312,00
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.040,06	1.030,96	894,34	810,33	758,98
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	3,26	3,54	3,66	3,66	2,99
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	4.807,52	5.418,13	5.341,99	5.083,80	4.784,74
b. ADHK 2010	4.160,39	4.024,42	3.409,60	3.020,68	2.767,92
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi pemerintah	11,31	-0,88	-13,25	-9,39	-6,34
b. Konsumsi perkapita	8,69	-3,27	-15,28	-11,41	-8,37
Jumlah penduduk (jiwa)	249.991	256.175	262.301	268.261	274.206

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Apabila dicermati lebih lanjut terlihat bahwa proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan, dari 3,26 persen di tahun 2013 hingga mencapai 3,66 persen pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan pada tahun 2017, proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan mencapai 2,99 persen. Selama periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 dan 2016.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambaran mengenai pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan hanya pada tahun 2013 yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 11,31 persen dan pertumbuhan konsumsi perkapita sebesar 8,69 persen. Selanjutnya pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah terus mengalami penurunan menjadi -0,88 persen pada tahun 2014, dan terus menurun pada tahun 2017 hingga mencapai -6,34 persen. Efisiensi anggaran dan menurunnya daya serap belanja yang dilakukan dinas/instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang menyebabkan konsumsi akhir pemerintah mengalami pertumbuhan negatif selama beberapa tahun terakhir.

### **3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO**

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan secara nominal (ADH Berlaku) dan berfluktuatif secara riil (ADH Konstan). Data di bawah menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 juga berfluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan PMTB sebesar 10,14 persen, kemudian melambat pada tahun 2014 mencapai 1,07 persen, kemudian terjadi penurunan di tahun 2015 dan 2016 yaitu negatif 0,28 persen dan negatif 2,94 persen. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan kembali mencapai 7,61 persen.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Paser, 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.690,78	6.811,55	7.107,95	7.344,86	8.081,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.745,15	5.806,64	5.790,43	5.620,19	6.047,99
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	18,12	17,35	18,55	19,70	18,42
Pertumbuhan PMTB (% ADHK)	10,14	1,07	-0,28	-2,94	7,61

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lainnya yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsinya dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Paser, 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	247,01	349,64	363,65	228,92	213,61
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	222,70	306,35	308,52	195,16	171,73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,67	0,89	0,95	0,61	0,49

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Secara umum, selama periode 2013 – 2017 nilai perubahan inventori bertanda positif, artinya terjadi penambahan persediaan setiap tahun. Jika dinilai atas dasar harga berlaku penambahan inventori tersebut berada dalam kisaran 213,61 sampai 363,65 miliar rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan penambahan inventori sekitar 171,73 sampai 308,52 miliar rupiah pada periode waktu yang sama. Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB dibawah satu persen.

### **3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH**

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran konsumsi (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh perekonomian domestik Kabupaten Paser. Untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut industri (sektor).

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan.

Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor antar kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADH Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Neto Kabupaten Paser, 2013 — 2017**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Neto					
a. ADHB (Miliar Rp)	24.261,41	25.793,99	24.212,16	22.973,51	28.719,67
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	22.541,06	23.736,64	23.538,24	22.285,04	22.288,93
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	65,72	65,72	63,20	61,61	65,45
Pertumbuhan Ekspor Neto (% ADHK)	5,95	5,30	-0,84	-5,32	0,02

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB**  
**KABUPATEN PASER, 2013 – 2017**

<https://paserkab.bps.go.id>



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Uraian berikut ini akan menyajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan atau dikonsumsi di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB per kapita.

**Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Paser, 2013 — 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	36.916,27	39.250,90	38.309,28	37.285,96	43.879,54
- ADHK 2010	33.281,22	34.782,54	34.472,88	32.761,34	33.131,44
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	147.670,38	153.219,09	146.050,83	138.991,37	160.024,00
- ADHK 2010	133.129,65	135.776,47	131.424,87	122.124,86	120.826,83
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,29	1,99	-3,20	-7,08	-1,06
Jumlah penduduk (jiwa)	249.991	256.175	262.301	268.261	274.206
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	6,81	4,51	-0,89	-4,96	1,13

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

PDRB per kapita Kabupaten Paser secara nominal berfluktuatif dari tahun ke tahun (Tabel 15). Dalam periode lima tahun terakhir, PDRB perkapita terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 138,99 juta rupiah dan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 160 juta rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap

penduduk Kabupaten Paser rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

#### 4.2 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 16. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Paser, 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	4.472,39	4.854,93	5.163,39	5.314,35	5.488,38
b. LNPRT	42,85	52,80	60,92	60,53	64,83
c. Pemerintah	1.201,84	1.387,99	1.401,21	1.363,78	1.312,00
Jumlah	5.717,07	6.295,71	6.625,52	6.738,67	6.865,22
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	36.916,27	39.250,90	38.309,28	37.285,96	43.879,54
Proporsi	15,49	16,04	17,29	18,07	15,65

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pada Tabel 16 diatas, terlihat bahwa proporsi pengeluaran konsumsi akhir terus meningkat dari 15,49 persen pada tahun 2013 menjadi 18,07 pada tahun 2016 tetapi setelah itu menurun menjadi 15,65 persen pada tahun 2017. Walaupun secara nominal masing-masing komponen konsumsi akhir cenderung meningkat, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan nilai total PDRB, sehingga proporsinya terhadap total PDRB menurun pada tahun 2017. Adapun pengeluaran konsumsi akhir yang paling besar ialah untuk Pengeluaran Rumah Akhir Tangga setelah itu disusul Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, kemudian yang paling sedikit adalah Konsumsi Akhir LNPRT.

#### 4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Tabel 17 menunjukkan bahwa produk yang digunakan untuk investasi fisik di Kabupaten Paser lebih besar dibandingkan dengan produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga.

**Tabel 17. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB, 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rupiah)	4.472,39	4.854,93	5.163,39	5.314,35	5.488,38
Total PMTB (Miliar Rupiah)	6.690,78	6.811,55	7.107,95	7.344,86	8.081,04
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	0,67	0,71	0,73	0,72	0,68

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2013, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 0,67 kemudian meningkat menjadi 0,73 pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun masing-masing menjadi 0,72 dan 0,68. Hal ini terjadi karena pertumbuhan investasi pada tahun-tahun tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.



**BAB V**  
**PENUTUP**

<https://paserkab.bps.go.id>



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 – 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Paser pada periode yang bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 – 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
3. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser pada tahun 2017 mencapai 43,88 triliun rupiah yang meningkat 6,59 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terjadinya peningkatan nilai ekspor neto, dimana nilai ekspor meningkat lebih tinggi daripada nilai impor yang menjadi komponen pengurang pada PDRB.
4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2017 menunjukkan kondisi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser yang tumbuh positif, yaitu sebesar 1,13 persen.
5. Hampir seluruh komponen pembentuk PDRB tumbuh positif pada tahun 2017, hanya Komponen Konsumsi Pemerintah yang mengalami pertumbuhan negatif.
6. Pertumbuhan PDRB perkapita secara riil terus melemah. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 3,36 persen. Kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2014 yaitu tumbuh sebesar 1,91 persen. Selanjutnya tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif, hingga mencapai negatif 1,87 persen pada tahun 2017.
7. Proporsi pengeluaran konsumsi akhir terus meningkat dari 15,49 persen pada tahun 2013 menjadi 18,07 pada tahun 2016 tetapi setelah itu menurun menjadi

15,65 persen pada tahun 2017. Walaupun secara nominal masing-masing komponen konsumsi akhir cenderung meningkat, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan nilai total PDRB, sehingga proporsinya terhadap total PDRB menurun pada tahun 2017.

8. Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB masih kecil yaitu sekitar 0,67 sampai 0,73 selama periode lima tahun terakhir.

<https://paserkab.bps.go.id>

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://paserkab.bps.go.id>



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta, 1999.
- Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
- Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
- Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
- \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
- Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
- Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.



## **LAMPIRAN**

<https://paserkab.bps.go.id>



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>4.472.388,94</b>	<b>4.854.927,74</b>	<b>5.163.385,93</b>	<b>5.314.354,59</b>	<b>5.488.384,07</b>
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	1.919.592,68	2.047.785,27	2.244.937,95	2.477.442,16	2.588.163,13
1.b. Pakaian	101.741,07	107.951,64	119.192,86	121.112,82	122.659,27
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	726.537,95	799.062,70	847.836,57	849.283,15	865.859,30
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	229.934,16	255.566,81	259.619,81	254.228,38	250.216,37
1.e. Transportasi dan komunikasi	821.552,01	906.144,12	919.606,96	884.030,28	899.495,67
1.f. Restoran dan Hotel	501.607,45	556.593,23	597.577,88	558.169,23	592.940,35
1.g. Lainnya	171.423,62	181.823,96	174.613,90	170.088,58	169.049,97
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>42.848,02</b>	<b>52.797,12</b>	<b>60.922,03</b>	<b>60.533,04</b>	<b>64.828,81</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>1.201.835,73</b>	<b>1.387.989,05</b>	<b>1.401.209,28</b>	<b>1.363.784,51</b>	<b>1.312.004,22</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>6.690.777,88</b>	<b>6.811.554,38</b>	<b>7.107.950,65</b>	<b>7.344.863,11</b>	<b>8.081.044,27</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>247.010,48</b>	<b>349.638,70</b>	<b>363.648,63</b>	<b>228.917,24</b>	<b>213.606,72</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>24.261.405,94</b>	<b>25.793.994,15</b>	<b>24.212.161,00</b>	<b>22.973.512,00</b>	<b>28.719.672,67</b>
<b>P D R B</b>	<b>36.916.266,99</b>	<b>39.250.901,15</b>	<b>38.309.277,52</b>	<b>37.285.964,49</b>	<b>43.879.540,76</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>3.695.481,21</b>	<b>3.859.285,12</b>	<b>3.894.766,30</b>	<b>3.806.887,67</b>	<b>3.818.377,84</b>
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	1.524.876,51	1.587.742,31	1.599.495,39	1.624.261,09	1.678.560,72
1.b. Pakaian	89.629,54	92.395,61	98.562,22	99.816,86	100.158,62
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	634.279,99	660.058,55	669.856,37	661.037,26	639.739,53
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	165.962,54	174.082,20	174.092,35	168.739,01	160.495,66
1.e. Transportasi dan komunikasi	722.262,88	756.397,54	756.877,23	707.904,00	683.984,84
1.f. Restoran dan Hotel	413.319,61	433.792,62	441.818,16	399.930,07	416.017,61
1.g. Lainnya	145.150,14	154.816,30	154.064,57	145.199,38	139.420,86
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>36.770,13</b>	<b>42.660,39</b>	<b>46.566,55</b>	<b>43.724,22</b>	<b>45.434,95</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>1.040.060,46</b>	<b>1.030.955,68</b>	<b>894.340,57</b>	<b>810.330,39</b>	<b>758.979,08</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>5.745.147,39</b>	<b>5.806.644,73</b>	<b>5.790.434,07</b>	<b>5.620.192,68</b>	<b>6.047.994,50</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>222.698,02</b>	<b>306.348,22</b>	<b>308.524,20</b>	<b>195.164,02</b>	<b>171.727,35</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>22.541.058,17</b>	<b>23.736.642,29</b>	<b>23.538.243,41</b>	<b>22.285.037,33</b>	<b>22.288.927,99</b>
<b>P D R B</b>	<b>33.281.215,38</b>	<b>34.782.536,43</b>	<b>34.472.875,10</b>	<b>32.761.336,30</b>	<b>33.131.441,71</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>12,11</b>	<b>12,37</b>	<b>13,48</b>	<b>14,25</b>	<b>12,51</b>
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	5,20	5,22	5,86	6,64	5,90
1.b. Pakaian	0,28	0,28	0,31	0,32	0,28
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1,97	2,04	2,21	2,28	1,97
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,62	0,65	0,68	0,68	0,57
1.e. Transportasi dan komunikasi	2,23	2,31	2,40	2,37	2,05
1.f. Restoran dan Hotel	1,36	1,42	1,56	1,50	1,35
1.g. Lainnya	0,46	0,46	0,46	0,46	0,39
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>3,26</b>	<b>3,54</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>2,99</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>18,12</b>	<b>17,35</b>	<b>18,55</b>	<b>19,70</b>	<b>18,42</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>0,67</b>	<b>0,89</b>	<b>0,95</b>	<b>0,61</b>	<b>0,49</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>65,72</b>	<b>65,72</b>	<b>63,20</b>	<b>61,61</b>	<b>65,45</b>
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>11,10</b>	<b>11,10</b>	<b>11,30</b>	<b>11,62</b>	<b>11,52</b>
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	4,58	4,56	4,64	4,96	5,07
1.b. Pakaian	0,27	0,27	0,29	0,30	0,30
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1,91	1,90	1,94	2,02	1,93
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,50	0,50	0,51	0,52	0,48
1.e. Transportasi dan komunikasi	2,17	2,17	2,20	2,16	2,06
1.f. Restoran dan Hotel	1,24	1,25	1,28	1,22	1,26
1.g. Lainnya	0,44	0,45	0,45	0,44	0,42
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>3,13</b>	<b>2,96</b>	<b>2,59</b>	<b>2,47</b>	<b>2,29</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>17,26</b>	<b>16,69</b>	<b>16,80</b>	<b>17,15</b>	<b>18,25</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>0,67</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>0,60</b>	<b>0,52</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>67,73</b>	<b>68,24</b>	<b>68,28</b>	<b>68,02</b>	<b>67,27</b>
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>12,80</b>	<b>8,55</b>	<b>6,35</b>	<b>2,92</b>	<b>3,27</b>
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	14,52	6,68	9,63	10,36	4,47
1.b. Pakaian	8,95	6,10	10,41	1,61	1,28
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	9,18	9,98	6,10	0,17	1,95
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	14,29	11,15	1,59	-2,08	-1,58
1.e. Transportasi dan komunikasi	10,95	10,30	1,49	-3,87	1,75
1.f. Restoran dan Hotel	16,10	10,96	7,36	-6,59	6,23
1.g. Lainnya	9,70	6,07	-3,97	-2,59	-0,61
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>21,76</b>	<b>23,22</b>	<b>15,39</b>	<b>-0,64</b>	<b>7,10</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>16,81</b>	<b>15,49</b>	<b>0,95</b>	<b>-2,67</b>	<b>-3,80</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>20,19</b>	<b>1,81</b>	<b>4,35</b>	<b>3,33</b>	<b>10,02</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>0,01</b>	<b>6,32</b>	<b>-6,13</b>	<b>-5,12</b>	<b>25,01</b>
<b>P D R B</b>	<b>5,19</b>	<b>6,32</b>	<b>-2,40</b>	<b>-2,67</b>	<b>17,68</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>5,84</b>	<b>4,43</b>	<b>0,92</b>	<b>-2,26</b>	<b>0,30</b>
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	5,36	4,12	0,74	1,55	3,34
1.b. Pakaian	3,33	3,09	6,67	1,27	0,34
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3,81	4,06	1,48	-1,32	-3,22
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,12	4,89	0,01	-3,08	-4,89
1.e. Transportasi dan komunikasi	6,26	4,73	0,06	-6,47	-3,38
1.f. Restoran dan Hotel	7,95	4,95	1,85	-9,48	4,02
1.g. Lainnya	11,39	6,66	-0,49	-5,75	-3,98
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>15,71</b>	<b>16,02</b>	<b>9,16</b>	<b>-6,10</b>	<b>3,91</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>11,31</b>	<b>-0,88</b>	<b>-13,25</b>	<b>-9,39</b>	<b>-6,34</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>10,14</b>	<b>1,07</b>	<b>-0,28</b>	<b>-2,94</b>	<b>7,61</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>5,95</b>	<b>5,30</b>	<b>-0,84</b>	<b>-5,32</b>	<b>0,02</b>
<b>P D R B</b>	<b>6,81</b>	<b>4,51</b>	<b>-0,89</b>	<b>-4,96</b>	<b>1,13</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)  
Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>121,02</b>	<b>125,80</b>	<b>132,57</b>	<b>139,60</b>	<b>143,74</b>
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	125,89	128,97	140,35	152,53	154,19
1.b. Pakaian	113,51	116,84	120,93	121,34	122,47
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	114,55	121,06	126,57	128,48	135,35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	138,55	146,81	149,13	150,66	155,90
1.e. Transportasi dan komunikasi	113,75	119,80	121,50	124,88	131,51
1.f. Restoran dan Hotel	121,36	128,31	135,25	139,57	142,53
1.g. Lainnya	118,10	117,44	113,34	117,14	121,25
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>116,53</b>	<b>123,76</b>	<b>130,83</b>	<b>138,44</b>	<b>142,68</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>115,55</b>	<b>134,63</b>	<b>156,68</b>	<b>168,30</b>	<b>172,86</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>116,46</b>	<b>117,31</b>	<b>122,75</b>	<b>130,69</b>	<b>133,62</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>110,92</b>	<b>114,13</b>	<b>117,87</b>	<b>117,29</b>	<b>124,39</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>107,63</b>	<b>108,67</b>	<b>102,86</b>	<b>103,09</b>	<b>128,85</b>
<b>P D R B</b>	<b>110,92</b>	<b>112,85</b>	<b>111,13</b>	<b>113,81</b>	<b>132,44</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2013 – 2017 (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>6,57</b>	<b>3,95</b>	<b>5,38</b>	<b>5,30</b>	<b>2,96</b>
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	8,69	2,45	8,82	8,67	1,09
1.b. Pakaian	5,44	2,93	3,51	0,33	0,93
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	5,17	5,69	4,55	1,51	5,35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,70	5,96	1,58	1,03	3,48
1.e. Transportasi dan komunikasi	4,42	5,32	1,42	2,78	5,31
1.f. Restoran dan Hotel	7,55	5,73	5,41	3,19	2,12
1.g. Lainnya	-1,51	-0,56	-3,50	3,36	3,51
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>5,23</b>	<b>6,21</b>	<b>5,71</b>	<b>5,82</b>	<b>3,06</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>4,94</b>	<b>16,51</b>	<b>16,37</b>	<b>7,42</b>	<b>2,71</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>9,13</b>	<b>0,73</b>	<b>4,64</b>	<b>6,46</b>	<b>2,24</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-5,61</b>	<b>0,96</b>	<b>-5,34</b>	<b>0,22</b>	<b>24,99</b>
<b>P D R B</b>	<b>-1,51</b>	<b>1,73</b>	<b>-1,52</b>	<b>2,41</b>	<b>16,37</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PASER**

Jl. Gajah Mada No. 76 Tana Paser  
Telp: (0543)21219  
E-mail: [bps6401@bps.go.id](mailto:bps6401@bps.go.id)  
Homepage: [paserkab.bps.go.id](http://paserkab.bps.go.id)

ISBN 978-602-52626-1-6

